

## Harus Tegas pada Perusahaan Tambang

Pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi harus tegas terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di daerahnya untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak sekadar mengeksploitasi sumber daya alam, tapi juga memastikan masyarakat di sekitarnya dapat sejahtera.

Penegasan ini disampaikan anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Rahmat dalam kunjungannya ke Kendari, baru-baru ini. Politisi Partai Demokrat itu kembali mengungkapkan adagium lama dari berbagai pengalaman tambang dunia ini, tidak ada daerah tambang yang kehidupan rakyatnya lebih baik dari daerah yang bukan tambang.

"Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperketat pengawasan dan ekstra hati-hati dalam menerbitkan izin usaha pertambangan kepada investor bidang pertambangan," tegas Andi Rahmat.

Menurutnya, berdasarkan UUD 1945, bahan mineral tambang merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, jika ada perusahaan tambang yang tidak bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan tambang, maka perusahaan tambang tersebut sebaiknya dibekukan izin operasionalnya.

Perusahaan tambang yang seperti itu, lanjut mantan Ketua DPC Demokrat Kota Kendari tersebut, hanya akan memperpanjang penderitaan dan kesengsaraan bagi warga negara, terutama mereka yang bermukim di sekitar kawasan tambang.

Dari pengalaman pertambangan yang terjadi di Indonesia, justru masyarakat daerah tambang lebih sengsara ketika terdapat perusahaan tambang yang beroperasi di daerahnya. Masyarakat di sejumlah kabupaten di Sultra yang terkena bencana banjir dan tanah longsor lebih banyak diakibatkan rusaknya lingkungan akibat aktifitas pertambangan.

Andi Rahmat menegaskan, jika perusahaan tambang tetap melanjutkan usahanya, maka pemerintah daerah harus berani memaksa perusahaan tersebut untuk melakukan rehabilitasi terhadap area-area yang sudah mereka rusak.

Sejumlah daerah di Sultra seperti Kabupaten Konawe Utara, Kolaka, dan Bombana, kini dalam kondisi kerusakan lingkungan yang sangat parah akibat aktifitas pertambangan. Sejauh ini, upaya rehabilitasi yang dilakukan perusahaan tambang masih sangat minim.

Perusahaan tambang yang dikenal telah melakukan rehabilitasi hanyalah PT. Aneka Tambang, sebuah perusahaan tambang milik negara. Sementara perusahaan lain yang jumlahnya mencapai 300-an yang tersebar di seluruh Sultra, sama sekali belum melakukan upaya rehabilitasi lahan.